



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDRIS RAHIM
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 51969

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.342.000.000**

1. Tanah Seluas 3914 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. Tanah Seluas 3990 m2 di BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. Tanah Seluas 9210 m2 di BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 669 m2/523 m2 di GORONTALO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/210 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 4013 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah Seluas 1113 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 849 m2/720 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/350 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 250.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2012, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 285.625.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.290.336.404
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.167.961.404
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.167.961.404

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.